

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Abu Daud Busroh,dkk.,*Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, 1985.
- Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*.
Jakarta,1999.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung.
1994.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, 1994.
- Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, *Prestasi Pustaka*, Jakarta,
2009.
- Ernst. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, 1960.
- H. A. Muin Fahmal,. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta, 2006.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*,
Jakarta. 1993.
- Irawan Soedjito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah*,
Jakarta,1981
- Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta. 1984.
- Lili Rasjidi dan B, Arief Sidarta, *filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung.
1989
- M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Bandung, 2002
- Miriam Budiarjo,*Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta.1988.

Mulyosudarmo, Suwono, *Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*, Jakarta, 1997.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung, 2011.

Mustamin Dg. Mattutu, dkk., *Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta, 1999.

Philipus M Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, 1997.

Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1988.

Sadu Wasistiono. *Meningkatkan Kinerja DPRD.Fokus*, Bandung, 2009.

S.F. Marbun, dkk., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, 2001.

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Jakarta, 1997.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, 1985.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. Jurnal Ilmiah dan Makalah

M. Satria, *Fenomena Penegakan Supremasi Hukum Pada Pemilihan Umum Pasca Penetapan Calon legislatif Tahun 2009*. Kendari, 2009.

Karhi Nisjar S, *Beberapa catatan tentang Good Governance*, Jurnal Administrasi dan Pembangunan , Vol.1 No.2, PERSADI LP3ES, Jakarta 1997.

Benyamin Hoessein, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah di Tingkat II Suatu Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta,1993,

Benyamin Hoessein, *Kebijakan Desentralisasi*, Jurnal Administrasi Negara Vol. 1 Universitas, Jakarta, 2002.

Philipus M. Hadjon, *Wewenang*, Jurnal Yuridika, Edisi Nomor 5 dan 6 Tahun XII, 1997.

Markus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijakan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1997.

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

E. Internet

Gamawan Fauzi, Pemberhentian Kepala Daerah <<https://www.tempo.co/read/kolom/2013/03/22/669/pemberhentian-kepala-daerah>> diakses pada Bulan Februari 2017.

Humas Jabar, Gubernur Serahkan SK Pemberhentian Bupati Ojang <http://jabarprov.go.id/index.php/news/19535/Gubernur_Serahkan_SK_Pemberhentian_Bupati_Ojang>, diakses pada Bulan Februari 2017.

Abba Gabrillin, Kaleidoskop 2016: 10 Kepala Daerah Tersangka Korupsi <<http://nasional.kompas.com/read/2016/12/12/09232571/kaleidoskop.2016.10.kepala.daerah.tersangka.korupsi.?page=all>>, diakses pada Bulan Februari 2017.

Anisa, Terkait Pemberhentian Bambang Kurniawan, Samsul Hadi : Saya Belum Terima Sknya <<https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-04/terkait-pemberhentian-bambang-kurniawan-samsul-hadi-saya-belum-terima-sk-nya/>> diakses pada bulan Februari 2017

Tri Yulianto, Bambang Kurniawan Resmi Diberhentikan Sementara dari Jabatan BupatiTanggamus<<http://lampung.tribunnews.com/2017/04/25/bambang-kurniawan-resmi-diberhentikan- sementara-dari-jabatan-bupati-tanggamus>> diakses pada bulan Februari 2017

Tim Redaksi, Ojang Sohandi Resmi Diberhentikan dari Posisi Bupati Subang <<http://www.tintahijau.com/pemerintahan/eksekutif/10951-ajang-sohandi-resmi-diberhentikan-dari-posisi-bupati-subang>> diakses pada bulan Maret 2017

Lutfi W.E PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH
<[https://majelisduha.wordpress.com/2008/10/27/pemberhentian-
sementara-kepala-daerah-vs-presumption-of-innocent](https://majelisduha.wordpress.com/2008/10/27/pemberhentian-
sementara-kepala-daerah-vs-presumption-of-innocent) diakses> diakses
pada 24 juli 2017.